

PENERAPAN EKSPOR IKAN DI KECAMATAN MORO KABUPATEN KARIMUN BERDASARKAN REZIM CCRF (CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES)

Oleh:

Guntur Irawan
NIM.190564201003

Abstrak

Di dunia internasional kegiatan perikanan juga turut menjadi perhatian FAO (Food and Agriculture Organization) yang kemudian melahirkan rezim internasional berupa Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sistem perikanan global, regional maupun internasional. Sebagai negara yang meratifikasi rezim CCRF maka Indonesia mengeluarkan aturan dalam negeri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah yang ada di Kepulauan Riau yang memiliki kekayaan kelautan dan perikanan yang melimpah salah satunya di Kecamatan Moro. Dengan hasil perikanan yang ada di Kecamatan Moro, terdapat perusahaan PT. Pulau Mas Moro Mulia sebagai eksportir perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menerapkan rezim CCRF di wilayah Kecamatan Moro khususnya PT. Pulau Mas Moro Mulia berdasarkan teori efektifitas rezim. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penerapan rezim CCRF di wilayah Kecamatan Moro masih memiliki beragam kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petugas dan minimnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dalam upaya penerapan perikanan yang bertanggung jawab. Sehingga dalam penerapan rezim CCRF ini masih diperlukan penambahan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang ada di tiap stakeholder yang ada di Kecamatan Moro khususnya PT. Pulau Mas Moro Mulia.

Kata Kunci : FAO, CCRF, ekspor , Kecamatan Moro, PT. Pulau Mas Moro Mulia

IMPLEMENTATION OF FISH EXPORTS IN MORO DISTRICT, KARIMUN DISTRICT BASED ON THE CCRF REGIME (CODE OF CONDUCT FOR RESPONSIBLE FISHERIES)

Author

Guntur Irawan
NIM.190564201003

Abstract

In the international world, fisheries activities have also become the concern of the FAO (Food and Agriculture Organization) which later gave birth to an international regime in the form of the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) which aims to maintain the sustainability of the global, regional and international fisheries system. As a country that ratified the CCRF regime, Indonesia issued domestic regulations, namely Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. Karimun Regency is one of the areas in the Riau Islands which has abundant marine and fisheries wealth, one of which is in Moro District. With fishery products in Moro District, there is a company PT. Mas Moro Mulia Island as a fisheries exporter. This research aims to look at the strategies and obstacles faced by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Riau Islands Province in implementing the CCRF regime in the Moro District area, especially PT. Pulau Mas Moro Mulia is based on the theory of regime effectiveness. In this research, researchers used descriptive qualitative methods, data collection techniques using observation, interviews and documentation. The implementation of the CCRF regime in the Moro District area still has various obstacles such as a lack of facilities and infrastructure needed by officers and a lack of qualified human resources in efforts to implement responsible fisheries. So, in implementing the CCRF regime, additional facilities and infrastructure and human resources are still needed for each stakeholder in Moro District, especially PT. Mas Moro Mulia Island.

Key Word: FAO, CCRF, Export, Moro District, PT. Mas Moro Mulia Island